

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Koalisi Partai Politik

Sejak pemilihan umum 1999, Indonesia beralih dari sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945, peralihan itu diikuti dengan purifikasi sistem presidensial. Salah satu upaya purifikasi tersebut, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Meskipun Indonesia saat ini menganut sistem presidensial yang telah mengalami purifikasi, ternyata praktiknya masih lebih berat ke sistem parlementer seperti halnya pada masa sebelum amandemen konstitusi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Fenomena tersebut telah memperlihatkan bahwa sistem presidensial yang diterapkan di dalam struktur politik multipartai dapat melahirkan problematika antara lembaga presiden dan parlemen.¹ Problematika tersebut ditambah diantaranya, akibat dari banyaknya partai politik yang bersaing, pemilu presiden hampir selalu menghasilkan presiden minoritas (*minority president*). Sedangkan pada pemilu legislatif hampir selalu menghasilkan peta kekuatan parlemen yang sangat fragmentasi serta tanpa adanya partai mayoritas di parlemen. Problematika tersebut tidak hanya dialami Susilo Bambang Yudhoyono (kabinet Indonesia Bersatu) melainkan sudah dialami Indonesia sejak pemerintahan

¹ Hanta Yuda, *op.cit.* hlm. 5.

Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) hingga Presiden Megawati (2001-2004) meskipun pada Era Abdurrahman Wahid (dengan kabinet persatuan nasional) dan Megawati (kabinet Gotong royong) belum berlaku presidensial murni seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika ketiganya membentuk kabinet yang menyertakan partai-partai lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk kabinet yang bersifat koalisi partai-partai politik. Jika melihat sejarah interaksi antara eksekutif-legislatif sejak tahun 1999, masuk akal jika setiap presiden memilih dan membentuk serta memelihara koalisi demi memastikan kelancaran suatu jalannya pemerintahan. Kebutuhan akan suatu koalisi juga dapat dimengerti jika melihat fakta bahwa sebelumnya telah ada upaya pemakzulan presiden. Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya telah belajar betul dari pemakzulan yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Susilo Bambang Yudhoyono sadar bahwa dalam sistem presidensial, pemakzulan sulit terjadi. Tetapi, ia tampaknya juga sadar mengingat bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan sikap kepartaian yang selalu berubah-ubah, secara politik pemakzulan masih mungkin terjadi. Belum lagi realitas politik bahwa sistem presidensial yang ada di Indonesia ini bergabung dengan sistem partai politik yang sangat

terfragmentasi, yang bisa saja dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik dalam menjegal ataupun menghalang-halangi agenda presiden.

1. Dinamika Koalisi Partai Politik Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 dan 2009

Pemilu 2004 merupakan tonggak awal institusionalisasi sistem presidensial murni di Indonesia, dimana pemilu menghasilkan pemerintahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai laboratorium politik pertama bagi berhasil atau tidaknya penerapan sistem presidensial. Pada pemilu 2004 rakyat dapat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.

Menjelang pemilu 2004 jumlah partai yang diakui keabsahannya sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman dan HAM adalah sebanyak 50 partai dan yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pemilu hanyalah 24 partai politik. Dari 24 partai tersebut diantaranya adalah partai lama yang memenuhi *electoral threshold* pada pemilu 1999 yaitu partai PDIP, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Selain itu ada partai yang bermetafosis sebagai akibat dari tidak lolosnya *electoral threshold*. Beberapa partai yang melakukan hal tersebut adalah Partai Keadilan yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan ada beberapa lainnya. Perbedaan dari

pemilu 2004 ini dibandingkan dengan sebelumnya ialah dimana pemilu dilakukan secara proposional terbuka, atau sistem perwakilan proposional dimana masyarakat dapat untuk memilih sendiri orang-orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pada pemilihan umum 2004, terdapat tujuh partai besar dan menengah yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai-partai tersebut adalah Golongan Karya (Golkar) dengan suara (23%), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) (19%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (10%), Partai Demokrat (10%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (9%), Partai Amanat Nasional (PAN) (6%), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8%). Ada sembilan partai politik lain yang memperoleh antara 1 dan 13 kursi (0,2-2,4%).

Dari hasil tersebut memberikan suatu gambaran bahwa tidak ada partai mayoritas sebagai pemenang tunggal dalam pemilihan umum legislatif 2004. Kondisi ini mempengaruhi penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden berasal dari partai politik. Oleh karena itu, koalisi antara partai politik menjadi keniscayaan seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang partai politik yang di dalamnya mengatur tentang syarat mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah 15 persen dari jumlah kursi di DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif.² Hal tersebut pula membuat Susilo Bambang

² Hanta Yuda, *op. cit.*, hlm. 66.

Yudhoyono sebagai salah satu kandidat calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat dalam Pilpres 2004 harus membangun koalisi agar mendapatkan kekuatan pendukung di parlemen. Perlu diketahui Partai Demokrat sendiri hanya mendapatkan suara sebesar 10 persen atau sebesar 57 kursi. Sedangkan pada pilpres 2004 ini di ikuti oleh 5 pasang calon presiden – wakil presiden yakni Wiranto-Salahudin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais- Siswono Yudo Husodo, Hamzah Haz- Agum Gumelar dan pasangan terakhir ialah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Setiap pasangan calon presiden-wakil presiden telah membentuk koalisi guna mengikuti Pilpres 2004. Pada pemilihan presiden putaran pertama Susilo Bambang Yudhoyono membangun koalisi yang beranggotakan beberapa partai yakni Demokrat, PBB, dan PKP Indonesia. Berikut tabel kekuatan pendukung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004.

Tabel 1. Pemilihan tahun 2004

NO	Pasangan Capres-Cawapres	Partai Pendukung	Jumlah suara partai pendukung	Jumlah suara	Perolehan suara (%)
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	Golkar, PKB, PKPB, PPNUI,	40.838.360	26.286.788	22,15

		Patriot Pancasila			
2.	Hj. Megawati Soekarno Putri dan H. Hasyim Muzadi	PDIP, PDS	23.392.511	31.569. 104	26,61
3.	Prof. Dr. HM., Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	PAN, PBR, PKS, PPDI, PSI, PNBK, PBSD, PNI Marhaenisme	22.718.462	17.392. 931	14,66
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	Partai Demokrat, PBB, PKPI	12.849.952	39.838. 184	33,57
5.	Dr. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	PPP	9.248.764	3.569.8 61	3,01

Sumber: Data KPU

Dapat dilihat dari koalisi dukungan partai, pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid memperoleh banyak dukungan partai, namun pada akhirnya pasangan tersebut tidak mendapatkan suara mayoritas pada

pemilihan presiden. Sebaliknya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - JK yang didukung tiga parpol koalisi pada putaran pertama mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden dan lolos untuk ke putaran kedua pemilihan presiden.

Pemilihan presiden dilanjutkan pada putaran kedua, dimana terjadi pergeseran koalisi di dalam pencalonan pasangan Mega-Hasyim yang semula didukung oleh koalisi partai politik PDIP, PDS lalu mendapatkan tambahan dukungan dari partai politik Golkar, PPP, PBR, PNI, PKPB, kemudian koalisi yang terbentuk ini diberi nama Koalisi Kebangsaan. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mendapatkan tambahan dukungan suara partai politik dari, PKS serta (mendapatkan dukungan individu dari beberapa para tokoh di PAN dan PKB), menjadikan koalisi ini beranggotakan Partai Demokrat, PKPI, PBB dan PKS yang mereka berinama dengan koalisi Kerakyatan.

Dukungan yang terjadi pada pemilihan presiden putaran kedua yang dilaksanakan ini tidak lagi memenuhi teori pembentukan koalisi berdasarkan ideologi, maupun latar belakang partai melihat dari kedua kubu koalisi yang terbentuk ini. Koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla kalah dalam hitung-hitungan suara partai politik dari pendukung pasangan Mega-Hasyim, tetapi realitanya berkata lain Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla lebih unggul suara di dalam pemilihan Presiden putaran kedua, dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla pemenang Pilpres 2004

dengan dukungan minoritas di parlemen. Setelah dinyatakan menang di dalam pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla membentuk kabinet Indonesia Bersatu. Koalisi membesar dengan melibatkan Partai PAN, Golkar, PPP, PKB, PBR dan partai pelopor. Golkar sendiri bisa ikut bergabung di dalam koalisi yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dikarenakan sosok Jusuf Kalla yang berhasil merebut kursi kepemimpinan partai Golkar. Berikut tabel susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil kompromi dengan partai pendukung.

Tabel. 2

No	Partai	Menteri		Kursi DPR	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Partai Demokrat	2	5,55	56	10
2.	PKPI	1	2,77	1	0,18
3.	PBB	2	5,55	11	2,00
4.	PKS	3	8,33	45	8,18
5.	Golkar	3	8,33	127	23
6.	PAN	2	5,55	53	9,63
7.	PPP	2	5,55	58	10,55
8.	PKB	3	8,33	52	9,46
9.	PBR	0	0	14	2,55
10.	PDIP	0	0	109	19,82
11.	PDS,	0	0	13	2,36

12.	Militer,	4	11,12	0	0
13.	Profesional,	9	25,01	0	0
14.	Akademisi,	3	8,33	0	0
15.	Birokrasi,	2	5,56	0	0

Sumber: Penelitian Bidang Politik The Indonesian Institute

Setelah lima tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Pilpres kembali diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Sedangkan pemilu Anggota DPR diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang dimana diikuti 116 partai politik yang mendaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM, namun hanya 44 partai politik yang lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu, dari 44 partai politik tersebut terdapat 6 partai lokal. Pada Pemilu ini 9 partai politik lolos *parliamentary threshold* sebesar 2,5% untuk dapat menduduki parlemen. Partai-partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura. Berikut tabel nama partai politik, perolehan suara dan jumlah kursi hasil pemilu 2009.

Tabel 3. Pemilihan 2009

NO	Partai	Perolehan Suara	%	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	148
2.	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45	108
3.	Partai PDIP	14.600.091	14,03	93
4.	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88	59
5.	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01	42
6.	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32	39
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94	30
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,44	26
9.	Partai Hanura	3.922.870	3,77	15

Sumber Pemilu 2009 dalam Angka

Dari hasil tabel pemilu di atas perolehan suara hampir sama dengan perolehan suara Pemilu pada tahun 2004, dimana tidak ada partai mayoritas sebagai pemenang tunggal dalam pemilihan umum sehingga pada Pemilu 2009 ini koalisi antara partai politik menjadi keniscayaan,

tidak hanya itu pemilu 2009 ini sebagai acuan yang sangat penting dan menentukan guna meraih tiket Pilpres.

Pada Pemilihan Presiden 2009, terdapat tiga calon presiden dan wakil presiden, mereka adalah Megawati - Prabowo yang diusung oleh koalisi partai politik antara lain PDIP, Partai Gerindra, PNI, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI. Jusuf Kalla dan Wiranto, diusung koalisi antara partai Golkar dan Partai Hanura, hal ini menarik Jusuf Kalla yang pada pemilihan presiden 2004, menjadi cawapres berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mencoba mengajukan diri menjadi Capres pada pemilihan presiden 2009 dengan basis partai Golkarnya, sedangkan pasangan terakhir yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung partai kolaisi antara lain Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PIB, Partai PDI dari beberapa partai pengusung Susilo Bambang Yudhoyono adalah partai lama yang telah masuk dalam koalisi pada pemilihan presiden 2004 .

Kali ini jalannya pemilihan presiden berlangsung hanya satu putaran berbeda dengan pilpres lima tahun yang lalu. Karena dapat dilihat dukungan anggota partai politik di dalam koalisi yang dibentuk begitu banyak didapatkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono serta didukung perolehan suara pemilihan presiden mencapai 69 persen sedangkan Megawati-Prabowo hanya mendapatkan suara

sebesar 27 persen. Hal ini menjadikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono menjadi pemenang Pilpres 2009.

Koalisi besar yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono pada pemilihan presiden 2009 ini bertujuan untuk mendukung jalannya pemerintahan dengan tolak ukur pada pemerintahan 2004 terdahulu, serta dengan harapan agar tidak adanya resistensi yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan meskipun harus melibatkan banyak partai yang dimana mayoritas partai pendukung tersebut adalah partai menengah dan partai kecil (dilihat dari hasil perolehan suara).

Adapula alasan partai politik yang ikut di dalam koalisi untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono, ialah figur Susilo Bambang Yudhoyono yang masih sangat populer sehingga memberikan harapan-harapan partai politik tersebut di dalam mendukung atau bergabung di dalam koalisi yang dibentuk. Alasan lainnya terlihat adalah untuk menempati posisi pemerintahan atau lebih dikenal *office seeking theory* dimana partai politik memposisikan diri untuk menjadi pengambil kebijakan.

Jadi hal itu lah yang lebih mendominasi koalisi partai politik pada Pemilihan Presiden 2009 yang dibentuk dari pada aspek ideologi, basis massa, dan latar belakang partai. Berikut beberapa corak basis massa partai dan ideologi partai politik pada koalisi 2004 dan 2009. Partai politik tersebut berada pada koalisi hingga berakhir periode,

diantaranya ialah partai Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, PBB, PKPI.

Tabel 4. Corak ideologi dan basis massa Parpol pada koalisi 2004-2009

Partai	Ideologi		Basis Islam
	Islam	Nasionalis	
Partai Demokrat		√	
Golkar		√	
PPP	√		
PAN		√	√
PKB		√	√
PKS	√		√
PBB	√		√
PKPI		√	

2. Dinamika Koalisi Partai Politik Era Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019

Setelah Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI dua periode, maka Pemilihan Capres dan Cawapres untuk periode 2014-2019 sudah mulai ramai untuk dibicarakan. Dimulai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa, “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau Gabungan

Partai Politik.” Sementara pada Pasal 9 Undang-Undang yang sama mengamanatkan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Sedangkan pada Pemilu 2014 ini sebanyak 15 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi KPU. Dari 15 partai politik tersebut terdiri dari 12 partai politik peserta pemilu nasional dan tiga lainnya adalah partai politik lokal. Berikut tabel hasil suara yang didapatkan partai politik nasional.³

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Suara Partai Politik 2014

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Resmi	Persentase	Kursi Parlemen
1.	PDIP	23.681.471	18,95	109
2.	Golkar	18.432.312	14,75	91
3.	Gerindra	14.760.371	11,81	73
4.	Demokrat	12.728.913	10,19	61
5.	PKB	11.298.957	9,04	47
6.	PKS	8.480.204	6,79	40

³ Hasil Rekapitulasi Suara Partai Politik, diolah dari data KPU

7.	NasDem	8.402.812	6,72	35
8.	PAN	9.481.621	7,57	49
9.	PPP	8.157.488	6,53	39
10.	Hanura	6.579.498	5,26	16
11.	PBB*	1.825.750	1,46	0
12.	PKPI*	1.143.094	0,91	0

(* tidak lolos ambang batas 3,5 persen)

Sumber Diolah dari KPU

Sebagaimana diketahui, berdasarkan tabel di atas tidak satupun partai dapat memenuhi ambang batas minimal untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Karena semua partai peserta pemilu tidak dapat memenuhi ambang batas tersebut, sangat jelas koalisi partai-gabungan partai politik menurut pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tidak bisa dihindarkan. Sebelum pencapresan 2014 terbentuk, ada tiga partai politik mengajukan beberapa nama untuk dicalonkan menjadi presiden. Ketiga partai politik tersebut ialah PDIP dengan mencalonkan Joko Widodo, Partai Golkar mengajukan Aburizal Bakrie, dan Partai Gerindra menjagokan Prabowo Subianto hingga berakhirnya perhitungan suara legislatif yang dilakukan oleh KPU pada 9 Mei 2014.

Disatu sisi PDIP, Golkar, dan Gerindra tetap ngotot dengan calon yang mereka ajukan sampai ketiga partai politik tersebut melakukan

lobi secara intens untuk mencapai syarat 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Namun disisi lain muncul gagasan untuk membentuk “Poros Islam” di antara partai-partai Islam seperti (PKB, PKS, PPP, PBB, dan PAN) jika digabungkan suara yang didapat 32 persen dan itu sudah lebih dari cukup untuk memajukan kandidat presiden, serta tujuannya dibentuknya koalisi ini jelas yakni mengajukan nama lain di luar calon ketiga partai politik di atas. Namun gagasan untuk membentuk poros Islam tersebut gagal dikarenakan dikarenakan PPP disinyalir ingin menjalin koalisi dengan Partai Gerindra.⁴ Akhirnya kandidat calon presiden mengerucut kepada dua nama yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang dirasa memiliki “daya magis” dalam pilpres 2014. Setelah nama calon presiden ditentukan Partai PDIP dan Partai Gerindra mulai membangun koalisi untuk mendukung nama nama calon yang di usung oleh masing-masing. Partai PDIP sendiri berkoalisi dengan NasDem (6,3 persen atau setara 35 kursi), PKB (47 kursi atau 9 persen), Partai Hanura (16 kursi atau 5 persen). Sedangkan Gerindra berkoalisi dengan PAN (49 kursi atau 7 persen), PKS (40 kursi atau 6 persen), dan PPP (39 kursi atau 6 persen). Jadi jika di akumulasikan antara kedua poros koalisi tersebut PDIP memperoleh 207 kursi atau setara dengan 37 persen sementara Gerindra memperoleh 201 kursi atau setara dengan 36 persen. Pada kedua koalisi ini belum termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat

⁴ Tentang konflik internal PPP menyangkut koalisi “prematur” dengan Partai Gerindra; lihat *Kompas* 25 April 2014.

karena keduanya belum menentukan sikap.⁵ Namun pada akhirnya Golkar menyatakan dukungannya kepada Gerindra sehingga Koalisi yang dibentuk mendapatkan tambahan 91 kursi atau setara 15 persen.

Akhirnya jalan yang berliku menuju koalisi partai berakhir. Dengan demikian hanya ada dua gabungan partai dalam pilpres 2014. Koalisi pertama adalah koalisi yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla dengan memberi nama koalisi mereka Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dimana di dalam koalisi tersebut beranggotakan partai PDIP sebagai partai peraih kursi terbanyak, NasDem, PKB, dan Hanura, koalisi ini dibentuk dengan persetujuan semua anggotanya untuk mendukung Agenda Prioritas (Nawa Cita) Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dan koalisi kedua yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta yang mereka berinama Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan partai politik seperti Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS.

Dapat dilihat konfigurasi Koalisi Merah Putih (KMP) mirip gabungan partai politik yang dibangun Partai Demokrat pada periode 2009-2014. Kala itu, koalisi yang dibangun Partai Demokrat mencakup PAN, PKS, PPP, dan Golkar, sementara Koalisi Merah Putih (KMP) di prakarsai oleh partai Gerindra, PAN, PKS, PPP. Hal tersebut memicu Joko Widodo selaku calon presiden dari PDIP merespon dengan berkata bahwa “dia tidak berminat dengan koalisi yang dibangun berdasarkan kesepakatan bagi-bagi kursi kabinet seperti yang terjadi pada era

⁵ Untuk lebih lanjut mengenai sikap politik Partai Golkar soal koalisi; lihat, *Tempo*, edisi 19-25 Mei 2014 dan 26 Mei-1 Juni 2014

sebelumnya”. Joko Widodo menegaskan bahwa dia menghendaki koalisi yang dibangun lebih berdasarkan *platform*.

Dua koalisi yang bersaing ketat dalam Pilpres 2014 juga bersaing memperebutkan “tiket dukungan” dari para pendulang suara. Persaingan keduanya berakhir ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan suara secara berjenjang melalui dari tingkat TPS hingga nasional. Di tingkat Nasional KPU melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 sejak 20 Juli sampai 22 Juli 2014. Sekitar pukul 20.00 WIB, KPU mengumumkan hasil akhirnya dengan ditandai keluarnya surat Keputusan KPU Nomor 535/KPP4/KPU/2014 tentang penetapan hasil perolehan suara dan hasil Pilpres 2014. Dimana Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan suara sebanyak 70.997.833 atau sebanyak 53.15% dari suara sah nasional.

B. Perbandingan Koalisi Partai Politik pada Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Dalam dua periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni pada tahun 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono senantiasa melakukan koalisi dengan berbagai partai politik untuk memberikan dukungan pada pemerintahannya. Kita tahu Partai Demokrat sebagai partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono

tidak pernah meraih suara mayoritas pada dua pemilu terakhir (2004 dan 2009).

Bahkan pada pemilu tahun 2004, meski berhasil menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, namun Partai Demokrat bukanlah partai pemenang pada pemilu saat itu. Perolehan suara yang didapat hanya (10,5%) kalah dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan suara (23%), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) (20%), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) (10,5%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (9,4%), Partai Amanat Nasional (PAN) (9,6%), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8,2%). Oleh karena itu, Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan beberapa partai lain untuk memenuhi syarat 20 persen, perolehan kursi parlemen pusat untuk mengajukan pasangan presiden.

Pada periode kedua, meski Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu tahun 2009, namun perolehan suara yang didapat tidak mencapai suara mayoritas. Dengan perolehan suara 20,85%, Partai Demokrat memang memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon Presiden yang kemudian dimenangkan kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun posisi partai demokrat belumlah kuat di parlemen. Hal tersebutlah yang mendasari Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk koalisi di dalam pemerintahannya dengan menempatkan beberapa kader dari partai lain untuk menduduki posisi menteri atau istilah lainnya adalah membagi-bagi jabatan di dalam pemerintahannya. Dengan

membentuk koalisi besar, Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kebijakan yang nantinya diajukan akan senantiasa mendapatkan dukungan dari semua anggota koalisi didalam parlemen.

Sedangkan pada pilpres 2014, partai PDIP yang mengusung Joko Widodo mendapatkan suara yang lebih banyak sejumlah (19,5%) dari partai politik yang lainnya namun suara dari PDIP belum mencapai 20 persen atau menjadi partai politik dengan suara mayoritas. Sama halnya yang terjadi pada dinamika koalisi era Susilo Bambang Yudhoyono, demi mendapatkankan dukungan di parlemen diperlukannya suatu koalisi. Joko Widodo membangun koalisi yang terdiri dari PDIP sebagai pengusung Joko Widodo, Partai Nasdem (6,3%), PKB (8,4%), Partai Hanura (2,9%), dimana koalisi ini menguasai 207 kursi DPR RI atau (37%).

Hal ini masih kalah dengan koalisi yang dibentuk oleh Prabowo yang mendapatkan 292 kursi di parlemen. Hal tersebut menjadikan Joko Widodo sebagai presiden dengan suara minoritas di parlemen. Namun mengetahui hal tersebut, Joko Widodo menegaskan, sejak awal tidak berminat dengan koalisi yang dibangun berdasarkan kesepakatan bagi-bagi kursi kabinet seperti yang terjadi pada era sebelumnya, ataupun pada era koalisi yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo menghendaki koalisi yang dibangun lebih berdasarkan kesamaan *platform*". Oleh sebab itu Joko Widodo lebih memilih membangun koalisi yang terbilang ramping.

Dari hal tersebut dapat kita lihat perbedaan dan persamaan koalisi yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Pertama*, keduanya sama-sama diusung oleh partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan/mayoritas sebesar 20 persen di parlemen, karena hasil suara lebih merata antara partai politik yang menyebabkan diperlukannya koalisi. *Kedua*, model koalisi yang dibentuk oleh keduanya dapat dikatakan sama yakni model koalisi besar dengan mengakomodasi partai anggota koalisi tersebut, meskipun diawal pemerintahan Joko Widodo menggunakan model koalisi ramping namun diperjalanannya model koalisi menjadi koalisi besar. *Ketiga*, persamaan yang terakhir, keduanya menjadi Presiden yang lunak-akomodatif dikarenakan model koalisi yang dibentuk akibat dari sistem multipartai pada sistem presidensial. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian posisi-posisi jabatan strategis terhadap partai-partai pengusungnya dengan harapan segala kebijakan dapat berjalan mulus. Tidak lepas dari persamaan yang ada terdapat pula perbedaan antara dinamika koalisi antara keduanya. *Pertama*, posisi jabatan di partai politik pengusung keduanya, kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono adalah ketua umum Partai Demokrat yang mengusung dirinya menjadi Presiden dalam dua periode, sedangkan Joko Widodo merupakan kader dari Partai PDIP yang mengusungnya menjadi Presiden tahun 2014. Dari hal tersebut dapat mempengaruhi di dalam komunikasi politik yang dibangun di dalam koalisi yang dibentuk. *Kedua*, di dalam jalanya koalisi pada pemerintahan keduanya, dapat dikatakan koalisi yang dibentuk oleh

Joko Widodo lebih sedikit manuver yang dilakukan anggota partai politik hal tersebut dikarenakan partai politik yang bergabung di dalam koalisi tersebut lebih patuh di dalam mendukung program nawa cita yang dicanangkan oleh Joko Widodo pada masa Kampanye terdahulu. Sedangkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, manuver yang dilakukan oleh partai politik anggota koalisi sangatlah banyak, dikarenakan sikap kurang disiplin partai politik di dalam mendukung sepenuhnya program yang dicanangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selain itu efek transisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia yang pada awalnya condong kepada parlementer menjadi presidensial.

Dari bentuk koalisi yang dibangun antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo ini masih menimbulkan problem-problem tersendiri yang dihadapi di era pemerintahannya.

C. Problem Koalisi Partai Politik di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Dari dinamika koalisi yang telah dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono (dalam dua periode pemerintahan) dan Joko Widodo, tidak lepas dari problematika yang terjadi pada jalannya periode pemerintahan masing-masing.

1. Problem Koalisi Partai Politik di Era Susilo Bambang Yudhoyono

Dimulai dari koalisi multipartai di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 dan 2009.

Pertama, rapuhnya ikatan koalisi di DPR. Dalam membentuk suatu pemerintahan yang kuat, efektif dan stabil diperlukan suatu koalisi yang permanen dimana koalisi tersebut dibentuk berdasarkan adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama, dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Bukan hanya koalisi yang bersifat pragmatis yang hanya didasarkan pada kepentingan sesaat untuk merebut suatu kekuasaan. Sebagaimana diketahui, koalisi di DPR merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, apalagi di dalam sistem presidensial dengan kombinasi multipartai. Sistem kepartaian sangat berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas dalam partai politik. Partai sendiri berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu, tergantung sistem apa yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur partai politik.⁶

Koalisi yang ada di DPR RI ditentukan oleh sistem kepartaian Indonesia itu sendiri yaitu sistem multipartai. Dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004 dan calon presiden harus dicalonkan dari partai politik. Ada 17 fraksi yang ada di DPR dan diantara 17 partai tersebut hanya satu partai yang bisa mencalonkan presiden sendiri yaitu Partai Golongan Karya dengan 23% suara nasional yang dimana diamanatkan pada UU No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bab II pasal 5 ayat 4 yaitu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah

⁶ Al Chaidar, 2005, *Pemilu Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Vs Partai Sekuler*, Jakarta, Darul Fallah, hlm. 89

kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Setelah, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah membentuk koalisi di DPR untuk mengamankan dan memuluskan kebijakan-kebijakan yang akan di implementasikan dalam pemerintahan sebab fungsi anggaran dan pengawasan merupakan wewenang DPR. Hal tersebut membuat Susilo Bambang Yudhoyono harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik dengan membentuk koalisi.

Kedua, kontrol yang berlebihan DPR mengganggu efektivitas pemerintah. Kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah periode 2004-2009 secara kuantitas menguasai mayoritas kursi di DPR. Mitra koalisi pemerintah merupakan partai politik yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Selain partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai partai presiden dan wakil presiden, ada beberapa partai mitra koalisi yang menyangga pemerintah yaitu, PPP, PAN, PKB, PKS, PBB, dan PKPI. Namun, keberadaan PBB dan PKPI tidak terlalu signifikan. Posisi empat partai menengah (PKS, PPP, PKB, PAN) sangat menentukan stabilitas pemerintah.

Kekuatan keempat partai politik menengah ini secara keseluruhan menguasai 37 persen suara di parlemen. Jika ada salah satu yang keluar dari koalisi, tetap tidak terlalu signifikan untuk menjadi kekuatan politik yang akan memakzulkan presiden. Jadi jika koalisi pendukung pemerintah

bubar, praktis yang tertinggal hanyalah partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai partai pemerintah yang hanya menguasai sekitar 33 persen kekuatan di DPR. Jika kondisi politik seperti itu, akan mengancam posisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Jika hal tersebut terjadi pemerintahan tidak akan berjalan efektif dan stabil. Ancaman *impeachment* menjadi sesuatu hal yang rentan apabila 37 persen mitra koalisi partai politik bergabung ke dalam koalisi oposisi yang dimana menguasai 20 persen suara di DPR, sehingga menjadikan koalisi oposisi memiliki suara mayoritas di DPR.⁷

Dilihat dari skala atau besaran kekuatan partai politik pendukung pemerintah di DPR, koalisi yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono termasuk di dalam koalisi yang sangat besar. Namun koalisi besar pendukung pemerintah ternyata rapuh secara internal. Pada periode 2004 dan 2009 partai politik koalisi pendukung pemerintah di DPR turut menggugat kebijakan pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Fenomena pengusulan 14 hak interpelasi dan sembilan hak angket selama dua periode 2004 dan 2009 mengakibatkan pemerintah dan DPR terfokuskan energi, waktu dan perhatian untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan politik dalam relasi eksekutif-legislatif.

Ketiga, kekuasaan wakil presiden yang lebih dominan dalam pemerintahan. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla yang awalnya didukung oleh empat partai yang dimana mendapat suara minoritas di

⁷ Hanta Yuda, *op.cit*, hlm. 188.

DPR, mendapatkan tambahan suara dari partai Golkar yang awalnya memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang menjadi kekuatan pendukung pemerintah. Hal itu ditenggarai karena menangnya Jusuf Kalla dalam Musyawarah Nasional VII Partai Golkar di Bali. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla pun terbangun di tengah komposisi politik yang khas. Yang awalnya didukung empat partai, setelah memenangkan pemilu dan membentuk kabinet Indonesia bersatu, koalisi membesar dengan masuknya Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keberhasilan Jusuf Kalla merebut kursi ketua umum Golkar di awal 2005, memperkuat koalisi ini. Problem koalisi rapuh dan pragmatis itu juga disebabkan ketidakseimbangan kekuatan partai presiden dan wakil presiden di parlemen yang menyebabkan posisi presiden cenderung bergantung pada dukungan partai wakil presiden. Pada saat itu dukungan politik Susilo Bambang Yudhoyono hanyalah partai demokrat dengan modal suara sepuluh persen kursi di DPR. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla ditopang sumber daya politik lebih besar dan kuat yaitu partai Golkar dengan perolehan suara 23 persen kursi di DPR.

Efek politiknya Jusuf Kalla memiliki peranan penting dan strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan juga memiliki peran penting dan menonjol dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini yang menjadikan terjadinya persaingan antara Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menimbulkan keretakan antara keduanya.

Keempat, hak prerogatif presiden tereduksi. Hak prerogatif itu sendiri adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling utama mengalami kompromi dalam kondisi multipartai pragmatis saat ini adalah kewenangan dalam penyusunan kabinet, khususnya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Pada proses penyusunan kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didorong untuk berkompromi dengan partai mitra koalisi pemerintah.

Selain itu kewenangan presiden dalam bidang legislasipun relatif lemah di DPR. Presiden dalam konstruksi presidensialisme Indonesia tidak memiliki hak veto secara eksplisit di dalam UU, seperti umumnya dimiliki oleh presiden-presiden di negara yang menganut sistem presidensial. Hal ini terjadi paska terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa petinggi partai politik seperti PAN dan PKS langsung mendatangi Cikeas untuk meminta jatah menteri yang harusnya menjadi kewenangan seorang presiden.⁸ Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh rakyat secara langsung, hak prerogatif tidak seutuhnya berjalan dengan mulus, hal tersebut mengakibatkan secara politis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mempertimbangkan kepentingan partai politik.

⁸ Majalah Gatra, *Banyak Jalan ke SBY*, No. 49, Tahun X, 23 Oktober 2004, hlm. 24

2. Problem Koalisi Partai Politik di Era Joko Widodo

Kali ini kita akan membahas problem koalisi partai politik di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dimana pada awal pemerintahannya telah muncul problem yang terjadi di DPR dimana terjadi kekakuan kubu kekuasaan. Hal ini terjadi akibat perolehan suara minoritas presiden di DPR dan tidak hanya itu, perseteruan yang timbul di waktu pemilihan presiden yang masih berlanjut. Zona elite yang terbelah di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), menimbulkan perpecahan di DPR dimana Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene menguasai kepemimpinan parlemen, baik di DPR maupun MPR, mendapat perlawanan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk kepemimpinan DPR tandingan. Terbentuknya DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditenggarai oleh pengalokasian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP) saat itu, dimana KMP hanya menawarkan 5 dari 63 kursi pimpinan kepada KIH. Tawaran tersebut lantas ditolak karena dinilai belum menggambarkan keterwakilan 44 persen perolehan kursi KIH di DPR. Maupun telah dilakukan upaya musyawarah antara KIH dan KMP namun tidak memperoleh hasil yang berarti. Dampak krusial di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini menimbulkan kebuntuan pelaksanaan fungsi DPR dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, terjadi ketidakharmonisan antara partai utama pendukung koalisi pemerintah, yaitu PDIP dengan Presiden. Selain adanya persoalan

komunikasi politik dalam relasi presiden dan PDIP, PDIP merasa tidak memperoleh jatah jabatan publik yang adil dikarenakan PDIP lah partai yang mengusung serta partai yang mendapatkan suara lebih banyak dari partai yang lain. Hingga akhirnya, Presiden melakukan *reshuffle* kabinet dengan memasukkan Pramono Anung, dengan hal itu mampu meredakan ketegangan relasi antara PDIP dan Presiden dan setidaknya menjadi relatif lebih baik.

Ketiga, desain koalisi yang dibangun Joko Widodo-Jusuf Kalla, dimana koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (KIH) dengan perolehan suara 41,43% kalah dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih(KMP) dengan perolehan suara 58,57%. Hal tersebut mendasari Joko Widodo mulai merubah desain koalisinya dengan desain koalisi besar seperti yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut tidak serta merta tanpa konsekuensi. Joko Widodo sadar akan konsekuensi yang akan didapatkan. Prinsip koalisi tanpa syarat yang digaungkan olehnya di dalam pembentukan koalisi di kala Pemilihan Presiden tidak mungkin lagi dapat diteruskan, setelah dirangkulnya beberapa anggota partai koalisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang meliputi PPP, PAN, dan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahannya di DPR. Golkar, PPP, dan PAN yang awalnya sebagai partai oposisi merubah haluannya menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.⁹ Hal tersebut dikarenakan faktor figur Joko Widodo

⁹ “PAN putuskan Bergabung dengan KIH”, *Kompas*, 2 September 2015, hlm. 2

itu sendiri, dan bukan hanya itu di dalam tubuh Golkar sendiri terjadi perpecahan yang terbagi menjadi dua kubu dimana salah satu kubu memilih untuk mendukung pemerintahan, hingga perpecahan tersebut teratasi Golkar tetap menjadi partai pendukung pemerintahan, begitu pula sama halnya dengan partai PPP dan PAN, dari semua dinamika itu bermuara kepada kepentingan untuk mendapatkan kursi-kursi pemerintahan. Pihak koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu berbagi sumber daya sebab, *there is no such thing as free lunch* untuk mengakomodasinya Joko Widodo membagi kursi jabatan di pemerintahannya, disisi lain relasi antara KIH dan KMP telah mencair dan tidak ada lagi partai oposisi di DPR.

Keempat, problem yang sama seperti pemerintahan sebelumnya antara Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dimana terjadi ketidak harmonisan ditandai dengan ketegangan dan persaingan. Salah satu sebabnya adalah presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik yang berbeda dan golongan yang berbeda, sehingga antara keduanya memiliki pandangan politik yang berbeda, hal ini juga terjadi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dimana kita tahu Joko Widodo bukan pemimpin partai sedangkan Jusuf Kalla pernah memimpin partai Golkar. Namun perpecahan yang terjadi antara keduanya tidak terlalu terang-benderang seperti dipemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Perpecahan yang terjadi antara Presiden dan Wakil Presiden

atau terjadinya *devided executive* tersebut dapat memperlemah sistem presidensial.

Kelima, Kabinet yang masih berbasis Partai Politik, yang kita ketahui susunan kabinet merupakan kunci keberhasilan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Jika gagal atau setidaknya tidak mampu untuk meramu dalam adonan yang tepat, maka bukan tidak mungkin akan menjadi suatu beban dan menghasilkan kegagalan dalam mengusuh visi dan misi. Publik tertarik untuk menetapkan pilihannya pada Joko Widodo sebagai presiden ke-7 dikarenakan Joko Widodo yang tidak tertarik untuk membagi-bagi kekuasaan sehingga tertawan oleh kepentingan partai politik, hal yang terjadi pada presiden sebelumnya. Namun realitanya Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri 34 kementerian dengan empat menteri koordinasi. Dari 34 kursi menteri, 15 orang berasal dari partai politik dan 19 dari profesional. Berikut daftar menteri yang berasal dari partai politik jilid I:¹⁰

Tabel 6.

Komposisi Kabinet Joko Widodo

NO	Nama	Kementrian	Asal Partai	Keterangan
1	Tedjo Edy Purdhianto	Menkopolhukan	Nasdem	Diganti oleh Luhut Panjaitan (di

¹⁰ “Berikut 15 menteri kabinet Jokowi yang bersal dari Partai Politik”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik>. Diakses pada tanggal, 14 Februari 2018.

				gantikan Wiranto pada Jilid II)
2	Puan Maharani	Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PDIP	(bertahan hingga jilid II)
3	Tjahyo Kumolo	Mendagri	PDIP	(bertahan hingga jilid II)
4	Yasonna H Laoli	Menkumham	PDIP	(bertahan hingga jilid II)
5	Rini MS Suwandi	Men BUMN	PDIP	(bertahan hingga jilid II)
6	AAGN Puspayoga	Menkop dan UKM	PDIP	(bertahan hingga jilid II)
7	Saleh Husin	Menperindustrian	Hanura	Digantikan Airlangga Hartanto pada jilid II
8	Hanif Dakhiri	Menaker	PKB	(bertahan hingga jilid II)
9	Siti Nurbaya	Men KLH dan Kehutanan	Nasdem	(bertahan hingga jilid II)
10	Yudi Crisnandi	Menpan	Hanura	Di gantikan Asman Abnur pada jilid II

11	Fery Mursydan	Men agraria dan tata ruang	Nasdem	Digantikan Sofyan Djalil (jilid II)
12	Marwan jafar	Men PDT dan Transmigrasi	PKB	Eko putro Sandjoyo (jilid II)
13	Lukman Hakim Saifudin	Menag	PPP	Bertahan hingga jilid II
14	Khofifah Indar Prawansa	Mensos	PKB	Bertahan hingga jilid II
15	Imam Nahrowi	Men Pemuda dan Olah raga	PKB	Bertahan hingga jilid II

Dari data kabinet kerja Joko Widodo jilid I, menunjukkan bahwa Joko Widodo gagal memanggul harapan publik yang telah diberikan. Dimana membentuk kabinet yang profesional (*zaken cabinet*) dan masih mengakomodasi kekuatan multipartai sebagaimana pada Era Susilo Bambang Yudhoyono. Kompilasi kabinet Joko Widodo adalah merupakan kabinet kompromi dalam rangka memperkuat dukungan di DPR sehingga setiap kebijakan Presiden berjalan mulus.¹¹

¹¹ Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 307.

D. Faktor membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif di Indonesia

Seperti telah disinggung di beberapa bagian lain dalam kajian ini, secara teoritis setiap sistem demokrasi terdapat dua pengertian dua arus utama sistem demokrasi, yakni demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial, dimana keduanya menuntut suatu format atau sistem kepartaian yang dianggap *compatible* dengannya. Sistem demokrasi parlementer tentu memiliki logika dan kebutuhan di dalam jumlah partai politik serta sistem kepartaian yang berbeda dibandingkan dengan sistem demokrasi presidensial, begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitan hal tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dilakukannya evaluasi, analisis dan menilai realitas partai politik dan sistem kepartaian era reformasi ini dan dengan dasar itu mencoba untuk merumuskan arah penataannya ke depan dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif, sudah tentu dalam konteks sistem demokrasi presidensial yang sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen, adapun beberapa faktor tersebut ialah:

Pertama, desain pemilu, dimana desain pemilu perlu dirancang untuk mendorong kepada penyederhanaan jumlah partai politik, sekaligus penguatan sistem presidensial. Dengan pilihan tersebut diperlukan berbagai rekayasa institusional sehingga pada akhirnya terbentuk sistem multipartai sederhana yang dianggap kompatibel dengan skema presidensial. Agenda rekayasa tersebut antara lain: menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed*

member proportional), untuk mengurangi distorsi dan kelemahan yang melekat pada sistem pluralitas. Dalam hubungan ini, maka pilihan perubahan sistem pemilu, misalnya ke arah sistem pluralitas khususnya yang bersifat campuran dalam rangka penyerdehanaan sistem kepartaian bukanlah sesuatu hal yang haram, seperti cenderung dikemukakan oleh beberapa kalangan. Sebaliknya, penyerdehanaan sistem kepartaian melalui perubahan sistem pemilu justru lebih lurus dan tidak berliku-liku serta terjal seperti halnya mekanisme penyerdehanaan sistem kepartaian tanpa mengutak-atik kemungkinan mengubah sistem pemilu.

Kedua, menerapkan ambang batas suara di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten. Sejauh ini telah dilakukannya rekayasa institusi antara lain pemberlakuan mekanisme *electoral threshold* (ET) yang membatasi partai politik dengan perolehan suara minimum tertentu untuk mengikuti pemilu berikutnya. Mekanisme ET ini telah diberlakukan untuk pemilu 2004 namun dirasa kurang efektif karena belum mengurangi jumlah partai politik efektif di parlemen, sehingga digantikan dengan *parliamentary threshold* (PT). Mekanisme PT ini berguna membatasi partai politik efektif di parlemen melalui persyaratan perolehan suara minimal secara nasional bagi semua partai politik peserta pemilu. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menetapkan PT sebesar 2,5 persen dari perolehan suara sah nasional sebagai syarat bagi partai politik untuk bisa duduk di kursi DPR.

Di luar mekanisme ET dan PT, melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif, DPR, dan Presiden selaku pembentuk UU, semakin memperketat syarat bagi parpol berbadan hukum di satu pihak, dan partai politik peserta pemilu di lain pihak. Jadi, meskipun syarat untuk membentuk partai politik relatif mudah, tidak semua partai politik yang memenuhi syarat UU Partai Politik dapat disahkan sebagai badan hukum yang terdaftar dalam Kementrian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia. Selanjutnya, tidak semua partai politik berbadan hukum bisa langsung ikut sebagai partai politik peserta pemilu karena persyaratannya lebih untuk diperketat lagi. UU No. 2 Tahun 2011, memberlakukan ketentuan kepemilikan kepengurusan di semua provinsi, sekurang-kurangnya 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama, serta minimal 50 persen kepengurusan kecamatan di kabupaten/kota yang sama, hal tersebut sebagai syarat partai politik mengikuti pemilu di luar syarat-syarat administratif lainnya.

Ketiga, desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untk menyederhanaan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti penyederhanaan pengelompokan fraksi di parlemen atas fraksi pendukung pemerintah disatu pihak, dan fraksi oposisi dan atau fraksi independen di pihak lain, selain itu melembagakan pembentukan koalisi secara permanen dalam arti suatu koalisi yang dibentuk secara publik dan bersifat notariat. Hal tersebut bertujuan agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka

checks and balances yang proposional untuk menghindari terlalu kuatnya legislatif. Serta disertai penguatan Kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengimbangi DPR agar fungsi *checks and balances* tidak hanya terjadi antara Presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.

Keempat, desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, terdapat beberapa agenda rekayasa institusional antara lain: penataan ulang legislasi, presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil presiden dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.¹²

Kelima, reformasi karakter partai politik. Dari partai politik pragmatis dan berorientasi jangka panjang menjadi partai politik yang memiliki *platform* politik dan visi kebangsaan yang jelas. Hal ini begitu penting dilakukan, karena faktanya dalam kaitan ini dapat diidentifikasi empat kelompok kegagalan-partai-partai politik di Indonesia, yaitu kegagalan organisasi dan institusi, kegagalan kepemimpinan, kegagalan ideologi, serta kegagalan taktik dan strategi.¹³ Kegagalan organisasi dan institusional dialami oleh partai-partai besar maupun kecil. Hampir tidak

¹² Hanta Yuda, *op.cit*, hlm. 272-273.

¹³ Arbi Sanit, 2003, *Perubahan Mendasar Partai Politik*, ed, Menggugat Partai Politik, Jakarta, *Laboratorium Ilmu Politik*, FISIP UI, hlm. 1-34.

ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggung jawab di dalam partai-partai karena tidak jarang keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai. Kegagalan pemimpin ini dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu orientasi sikap dan tingkah laku, kematangan etis, dan kualifikasi serta kemampuan elite partai dalam *performance* politik mereka. Penolakan para pimpinan partai untuk melepaskan jabatan rangkap-rangkap di partai dan jabatan publik. Hal ini merupakan indikasi bagi kualitas sikap dan perilaku yang rendah pula.¹⁴ Begitu juga dengan kecenderungan para elite partai meraih dukungan dengan memanipulasi identitas kultural dan primordial, jelas merupakan contoh lain kegagalan kepemimpinan di kalangan partai. Seharusnya seorang pemimpin partai harus bisa mendidik rakyat supaya mendukung mereka secara rasional berdasarkan prinsip pertukaran dukungan dengan pelayanan publik. Dalam konteks ideologi, para politisi partai cenderung bersifat mendua dan tidak konsisten. Di satu pihak secara formal dan verbal mendukung ideologi, baik ideologi negara maupun ideologi partai, tetapi dalam perilaku seringkali menggunakan dukungan itu untuk kepentingan kekuasaan belaka. Sementara itu fungsi partai politik dimana berfungsi sebagai pendidikan politik tidak pernah disentuh dan menjadi agenda partai-partai politik. Partai politik kita cenderung bersembunyi di balik baju yang

¹⁴ Karena sebagian besar calon legislatif terpilih di DPRD kabupaten dan kota adalah pengurus partai itu sendiri maka kantor-kantor partai akhirnya kosong setelah Dewan mulai bekerja. Lihat Syamsuddin Haris, dkk. "Kinerja dan Akuntabilitas Partai-partai di DPRD", Laporan Penelitian P2P-LIPI, 2006

bersifat ideologis, dibelakang kharisma pribadi para elitnya, serta dibalik isu-isu besar yang tidak pernah diterjemahkan secara kontekstual-operasional.

Keenam, didukung oleh personalitas dan karakter kepemimpinan presiden yang kuat dan tegas. Hal ini pula salah satu faktor penting di dalam pembentukan pemerintahan yang stabil dan efektif. Presiden yang kuat dan tegas ini bertujuan agar tidak mudah untuk diintervensi dalam pembentukan kabinetnya. Struktur kabinet yang ideal adalah 10 persen dari partai politik koalisinya, sedangkan sisanya diisi dari kalangan profesional murni non partai politik. Dengan angka 10 persen ini dapat diharapkan intervensi partai politik koalisinya semakin kecil dan lebih mengutamakan tingkat profesionalitas dari para menteri yang telah ditunjuk. Selain itu para menteri yang ditunjuk tidak merangkap jabatan di partai politiknya agar, para menteri tersebut bisa royal kepada presiden.